

# **Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kecamatan Tembalang**

Oleh :

Radiksa Arvian Sitranata, Slamet Santoso

**Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http:// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Salah satu pembangunan yang menjadi perhatian adalah kebutuhan air bersih dan sanitasi. Pamsimas merupakan salah satu bentuk solusi dari kurangnya air bersih dan sanitasi di Indonesia. Tetapi pelaksanaan Pamsimas masih belum optimal, tidak terkecuali pelaksanaan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kecamatan Tembalang. Dalam evaluasi ini digunakan enam kriteria evaluasi yaitu efisiensi, efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pamsimas di Kecamatan Tembalang sudah efektif dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi. Tetapi masih ditemui kekurangan, seperti kurang meratanya pembangunan tower air dan perpipaan Pamsimas, selain tidak merata masih banyak warga miskin yang masih belum dapat mendapatkan Pamsimas. Rekomendasi untuk meningkatkan pemerataan pembangunan Pamsimas dapat dilakukan pada saat musyawarah penentuan prioritas pembangunan dilakukan oleh seluruh elemen pelaksana Pamsimas, hal ini agar tercipta keadilan dan pemerataan pada pembangunan karena diawasi langsung oleh semua pihak yang terkait.

**Kata Kunci :Evaluasi, Pamsimas, Air Bersih, Sanitasi, Faktor**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs), yaitu menurunnya jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar sebesar 50 % pada tahun 2015. Pasal 5 Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

Program WSLIC-3/PAMSIMAS (*Third Water Supply and Sanitation for Low Income Community*/Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

*Key Performance Indicator*(KPI) menunjukkan Pamsimas secara nasional sangat signifikan dalam memenuhi capaian per tahunnya. Pamsimas secara nasional terbilang sukses karena sudah jauh melampaui target yang sudah ditetapkan.

Pamsimas telah meningkatkan jumlah masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses air minum dan sanitasi yang layak, dari tahun ke tahun juga semakin banyak desa yang memasukkan Pamsimas ke RKM mereka. Pamsimas juga secara umum mengurangi kebiasaan masyarakat yang kurang pemahaman agar tidak BABS dan memulai mencanangkan cuci tangan pakai sabun mulai dari sekolah-sekolah dasar.

Tetapi capaian tersebut masih belum merata di semua wilayah Indonesia. Karena sebenarnya Pamsimas diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan tinggal di pinggiran kota atau masyarakat yang belum memiliki pengetahuan tentang air minum dan sanitasi yang baik.

Diantara masyarakat yang belum terlayani, masyarakat berpenghasilan

rendah di perdesaan dan pinggiran kota termasuk kelompok yang rentan mengakses air minum dan sanitasi yang layak tersebut. Namun demikian, bagi daerah-daerah dengan wilayah pedesaan relatif luas, berpenduduk miskin relatif tinggi dan mempunyai kapasitas fiskal rendah, pada umumnya kemampuan mereka sangat terbatas, sehingga memerlukan dukungan finansial untuk membiayai investasi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanannya kepada masyarakat, baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik yang terdiri dari manajemen, teknis dan pengembangan sumber daya manusia.

Keikutsertaan Kota Semarang dalam Pamsimas ini sudah dilakukan sejak Pamsimas I tahun 2008. Pamsimas di Kota Semarang sudah sangat berkembang pesat. Kecamatan-kecamatan di Kota Semarang berlomba-lomba menyediakan pelayanan yang terbaik dalam Pamsimas ini. Tetapi beberapa kecamatan juga masih sangat kurang seperti yang terjadi di kecamatan Banyumanik dan Tembalang.

Kecamatan Tembalang, Kota Semarang juga turut andil dalam

mencukupi kebutuhan sanitasi dan air minum untuk warganya. Namun pelaksanaan Pamsimas di Kecamatan Tembalang mendudukan peringkat bawah di banding kecamatan lainnya di Kota Semarang.

Hal ini disebabkan beberapa isu yang terjadi pada pelaksanaan Pamsimas, baik dari segi perencanaan, pembangunan sampai monitoring evaluasi Kecamatan Tembalang masih tertinggal jauh sesuai dengan buku pedoman dan petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh Pusat.

Kecamatan Tembalang memiliki 12 kelurahan, masing-masing dikelurahan tersebut memiliki tower Pamsimas yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Tembalang. Namun dalam pelaksanaannya masih sering terjadi kekurangan, kekurangan tersebut terjadi di beberapa proses kebijakan. Dibidang administrasi misalnya, dalam rangka untuk mengetahui kinerja Pamsimas seharusnya dilakukan evaluasi setiap bulannya, evaluasi tersebut berdasarkan pada pelaporan pihak BPSPAM selaku masyarakat yang bertanggung jawab terhadap Pamsimas di daerah tersebut

sering tidak mengikuti pedoman dan tata cara yang sudah ditentukan.

Administrasi Pamsimas mau tidak mau haruslah dibuat sesuai dengan ketentuan. Kekurangan SDM yang kurang kompeten dalam pembukuan dan mindset BPSPAM yang belum terlalu mementingkan administrasi menjadi faktor bahwa Pamsimas menjadi susah dievaluasi di beberapa kelurahan. Terlebih parah lagi, ada beberapa kasus yang terjadi bahwa terjadi manipulasi data yang biasanya akan memicu konflik sosial antar warga dan pihak pengelola.

Penentuan awal desa yang akan melaksanakan Pamsimas juga terkadang mendapat intervensi dari beberapa pihak. Intervensi tersebut biasanya untuk memperebutkan prioritas daerah mana yang akan dibangun tower Pamsimas. Padahal yang seharusnya sudah memiliki daftar prioritas pembangunan yang sudah ditentukan dan tidak dapat diganti begitu saja tanpa campur tangan dari pihak lain.

Pelaksanaan Pamsimas juga mengalami ketidaksinkronisasian antara SKPD yang bertanggung jawab. Dinas-dinas terkait, konsultan, dan pihak swasta masih tidak memberlakukan Pamsimas

sebagai prioritas tugas mereka. Hal ini mempengaruhi perencanaan Pamsimas, karena dengan terjadinya hal tersebut seringkali membuat molor beberapa jadwal yang sudah ditentukan.

Banyaknya kekurangan dari keseluruhan Pamsimas di Kecamatan Tembalang yang tidak sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis merupakan salah satu isu yang harus diselesaikan, agar keberlanjutan program kedepan terus meningkat dan memberikan pelayanan yang optimal.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kinerja Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kecamatan Tembalang?
2. Apa saja faktor penentu keberhasilan Pamsimas di Kecamatan Tembalang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penyusunan penulisan karya ilmiah ini mempunyai tujuan :

1. Mendeskripsikan kinerja program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(Pamsimas) di Kecamatan Tembalang.

2. Mendeskripsikan faktor penentu kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kecamatan Tembalang.

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Administrasi Publik**

Menurut David H. Rosenbloom, administrasi publik merupakan pemanfaatan teori – teori dan proses – proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif dan eksekutif, dalam rangka fungsi – fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Menurut Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus, ada 3 hal dalam administrasi publik yaitu (1) meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan – badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha – usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, (3) suatu proses

yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan – kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik – teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

##### **2. Kebijakan Publik**

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiadakan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do).

Menurut Chandler dan Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Menurut A. Hoogerwerf, kebijakan public sebagai unsure penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.

##### **3. Evaluasi Kebijakan**

Pengertian evaluasi yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang dikemukakan oleh Scriven yang dikutip oleh Fitzpatrick, Sanders dan

Worthen menyatakan bahwa “evaluation as judging the worth or merit of something”. Berdasarkan definisi dari Scriven ini selanjutnya Fitzpatrick, Sanders dan Worthen mempertegas bahwa evaluasi adalah mendeterminasi manfaat atau nilai dari suatu objek evaluasi. Secara lebih luas evaluasi dapat didefinisikan sebagai mengidentifikasi, mengklarifikasi dan menerapkan sejumlah kriteria untuk mendeterminasi obyek yang dievaluasi.

Sedangkan evaluasi kebijakan menurut Anderson adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Sudiyono mengungkapkan Studi evaluasi kebijakan merupakan suatu analisis yang bersifat evaluatif sehingga konsekuensinya lebih retrospeksi dibandingkan prospeksi. Dan dalam mengevaluasi seorang analis berusaha mengidentifikasi efek yang semula direncanakan untuk merealisasi suatu keberhasilan dan dampak apa yang ditimbulkan dari akibat suatu kebijakan

#### **4. Kriteria Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi pada “perumusan” dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu lebih kepada “proses” perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Secara umum, Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut (Riant Nugroho, 2004: 185-186)

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Suatu kebijakan dikatakan efisien jika suatu kebijakan dapat mencapai efektivitas yang tinggi dengan biaya yang rendah.

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas

memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Kriteria perataan erat hubungannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber daya dalam masyarakat.

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas berbicara tentang apakah kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan secara nyata mencerminkan kebutuhan, preferensi dan nilai dari kelompok tertentu.

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersamaan. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program

dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tembalang. Informan pada penelitian ini adalah seluruh elemen yang berwenang menangani Pamsimas di Kecamatan Tembalang. Adapun teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dan interpretasi data melalui reduksi dengan mengelompokkan hal-hal pokok, kemudian disajikan dan pada akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan. Kualitas atau keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kinerja Pamsimas Kecamatan Tembalang

#### 1. Efektivitas

“Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429).

Kriteria efektivitas hasil penelitian menerangkan bahwa Pamsimas dapat dikatakan telah mencukupi, hal ini dapat dilihat dari terlampauinya target dengan realisasi yang cukup tinggi diatas target. Tercapainya jumlah tambahan orang yang memiliki akses air minum yang layak tercapai dan juga jumlah tambahan orang yang memiliki akses sanitasi yang layak juga bertambah.

Sesuai teori yang digunakan peneliti, pelaksanaan Pamsimas di Kecamatan Tembalang telah memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, hal ini dilihat dari target dan capaian penerima

program Pamsimas telah memenuhi target bahkan melebihi dari target yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pamsimas di Kecamatan Tembalang sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 telah mendapatkan setidaknya 876 KK tambahan yang telah mendapatkan akses air bersih, hal tersebut naik setiap tahunnya dan selalu melebihi target. Begitu pula dengan akses sanitasi yang diterima masyarakat Tembalang sudah dapat tercapai melebihi dari target yang telah direncanakan.

#### 2. Efisiensi

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).



Hasil penelitian menjelaskan jika kriteria efisiensi pada Pamsimas Kecamatan Tembalang dapat dikatakan sudah cukup. Realisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang sudah sesuai porsinya, tetapi jatah tersebut dinilai kurang untuk pembangunan Pamsimas yang perkembangannya tergolong pesat.

Penyerapan anggaran sudah cukup, dengan terbatasnya anggaran yang diberikan Pamsimas tetap menjalankan pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur, terbatasnya anggaran tersebut juga menuntut kelurahan untuk menghemat biaya pada saat pembangunan fasilitas.

Sedikitnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah tidak membuat tingkat efektivitas dalam mendapat penerima program Pamsimas berkurang, Pamsimas secara tidak terduga malah dapat melebihi target efektivitas yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah usaha yang dilakukan dapat dinilai sepadan dengan tingkat efektivitas yang dihasilkan oleh Pamsimas.

### **3. Kecukupan**

“Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah” (Dunn, 2003:430).

Pamsimas yang telah di laksanakan di Kecamatan Tembalang telah berhasil memenuhi kebutuhan akan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat yang kurang mampu, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan lancar. Pelaksana Pamsimas masih sangat kurang dalam memahami dan melaksanakan apa yang sudah tertulis pada buku pedoman dan buku petunjuk teknis.

Buku pedoman yang seharusnya dikuasai oleh pelaksana Pamsimas masih dianggap sebagai sarana formalitas saja, tidak diterapkan secara menyeluruh. Kurangnya sumber daya manusia dalam mengikuti prosedur menyebabkan permasalahan tersendiri.

Pelaporan rutin, pembukuan dan proses administratif masih jarang dilakukan, walaupun dilakukan tidak seratus persen. Akibatnya menyebabkan permasalahan-permasalahan lain seperti telatnya pelaporan, kurangnya transparansi, kurangnya akuntabilitas, ketidakakuratan data dan gagalnya dalam proses evaluasi untuk Pamsimas selanjutnya.

Ini artinya Pamsimas di Kecamatan Tembalang belum memenuhi kriteria kecukupan, terlihat dari Pamsimas dapat memuaskan kebutuhan akan air bersih dan sanitasi tetapi dilain sisi Pamsimas sebagai kesempatan untuk memenuhi kebutuhan juga masih menimbulkan permasalahan lain

#### **4. Perataan**

“Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada

distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat” (Dunn, 2003:434). Perataan dari segi pembangunan sarana dan prasarana Pamsimas, seperti saluran pipa air minum, fasilitas sanitasi dan tower sumber air Pamsimas yang digunakan untuk mengaliri perpipaan.

Selain perataan dalam segi fasilitas, peneliti memfokuskan kriteria perataan pada saat penentuan prioritas pemilihan, apakah penentuan pemilihan proyek tersebut tanpa intervensi atau bebas nilai.

Hasil penelitian pada kriteria perataan ternyata, pendirian titik Pamsimas sudah sesuai dengan prosedur dan kebutuhan, meskipun sering terjadi penolakan dari masyarakat mengenai titik yang ditentukan. Sedangkan untuk politik dalam pelaksanaan Pamsimas sering ditemui, biasanya terjadi dalam rapat prioritas pembangunan tower dan saluran air. Permasalahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik antar warga.

## 5. Responsivitas

“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003:437).

Hasil penelitian Pamsimas di Kecamatan Tembalang menjabarkan jika Pamsimas mengubah gaya hidup bersih pada masyarakat. Masyarakat telah memahami pentingnya gaya hidup bersih, yang telah disosialisasikan Pamsimas melalui program-programnya seperti kebiasaan cuci tangan pakai sabun, membuang sampah pada tempatnya dan menghilangkan kebiasaan BABS.

Tetapi masih saja segala kemudahan yang diberikan oleh program Pamsimas, masyarakat Kecamatan Tembalang masih mendapatkan respon negatif dari warga, berkaitan iuran ataupun dengan seringnya kerusakan fasilitas yang ada.

Jadi pelaksanaan Pamsimas dilihat dari segi kriteria responsivitasnya dikatakan belum tercapai seluruhnya meskipun Pamsimas sudah dapat dikatakan berhasil dalam mengubah gaya hidup bersih warga Tembalang, tetapi keadaan dilapangan juga menjelaskan bahwa banyaknya kekurangan dari segi fasilitas dinilai belum dapat memuaskan kebutuhan kelompok.

## 6. Ketepatan

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa sudah seluruh kelurahan di Kecamatan Tembalang rutin menambahkan Pamsimas ke RKM mereka, pelaksanaan tersebut sudah

sesuai dengan tuntutan dari pemerintah kota karena digunakan untuk pemenuhan target untuk dipertimbangkan pada saat evaluasi.

Tetapi ternyata masih banyak masyarakat yang belum terjamah Pamsimas, padahal seharusnya mendapatkan bantuan air bersih dan sanitasi. Kejadian ini disebabkan oleh faktor eksternal yaitu kondisi geografis yang ada di masing-masing daerah kadang tidak mendukung sehingga tidak dapat mencapai daerah-daerah tertentu.

Kriteria ketepatan masih dikatakan belum optimal, karena meskipun sudah semua kelurahan memasukkan Pamsimas kedalam RKM masih saja banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi malah belum mendapatkan Pamsimas sama sekali.

## **B. Faktor Penentu Keberhasilan Program**

### **1. Sumber Daya**

Sumber daya dana yang disediakan di setiap kelurahannya sangat terbatas dikarenakan porsi dari kota juga

sedikit, kurangnya anggaran sangat berpengaruh terhadap fasilitas dan sarana yang akan disediakan untuk masyarakat.

Kewenangan juga mempengaruhi keberhasilan program, banyaknya SKPD yang menangani Pamsimas terkadang menimbulkan kurangnya koordinasi antar lembaga, kurangnya koordinasi tersebut sudah pasti akan mempengaruhi sebuah kebijakan.

Sumber daya yang lain mempengaruhi keberhasilan program adalah sumber daya manusia. Kurangnya kinerja Pamsimas salah satunya disebabkan oleh SDM yang kurang, hasil penelitian menunjukkan Pamsimas sangat kekurangan SDM baik secara kuantitas dan kualitas. Kurangnya SDM ini sangat mempengaruhi bagaimana keberhasilan program, karena SDM lah yang menangani dari awal sampai akhir program Pamsimas. Hasil penelitian menjelaskan faktor sumber daya dapat dikatakan masih kurang.

## 2. Kelembagaan

Pada hasil penelitian menjelaskan banyaknya kekurangan disektor kelembagaan secara langsung mengurangi kinerja program yang berdampak pada keberhasilan atau kegagalan program. BPSPAMS sebagai pengurus dilevel kelurahan sangatlah vital dalam menjaga perannya, karena jika BPSPAMS tersebut baik, maka kinerja Pamsimas di kelurahan tersebut juga baik.

Upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja BPSPAMS merupakan bentuk usaha untuk mencapai keberhasilan program dari faktor lembaga. Analisis peneliti adalah peran sebuah lembaga dalam Pamsimas sangat penting. Banyaknya pelaksana Pamsimas yang ikut bertanggung jawab membuat faktor lembaga juga mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program.

Pengaruh faktor kelembagaan dalam Pamsimas sangatlah tinggi, tetapi hasilnya sangat belum cukup baik, hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang terkait dengan Pamsimas. Lembaga tersebut belum berfungsi

sepenuhnya seperti yang telah ditetapkan. Sadar akan pentingnya sebuah lembaga, pemerintah membuat langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja lembaga yang ada di Pamsimas.

## 3. Komunikasi

Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*)

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Buku pedoman dan buku petunjuk teknis yang diadakan juga sudah meliputi dimensi kejelasan. Buku pedoman ditujukan untuk mengatur segala sesuatunya baik yang bersifat umum dan teknis operasional, diharapkan dengan adanya buku pedoman dapat mengurangi kesalahan interpretasi dari pelaksana Pamsimas.

Kesimpulan dari faktor komunikasi mempengaruhi Pamsimas yaitu, komunikasi telah diterapkan secara baik, tetapi melihat dari faktor lain seperti sumber daya membuat komunikasi yang telah baik dilakukan menjadi kurang dan mengurangi performa kinerja Pamsimas.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kinerja Pamsimas Kecamatan Tembalang:

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, pelaksanaan Pamsimas di Kecamatan Tembalang dinilai masih banyak kekurangan, empat dari enam kriteria yang digunakan masih belum bisa dikatakan berhasil, hal ini mengakibatkan kinerja Pamsimas di Kecamatan Tembalang di katakan rendah dan belum optimal.

Faktor Penentu Keberhasilan Program:

Peneliti dalam mengevaluasi kebijakan Pamsimas di Kecamatan Tembalang melihat dari tiga faktor yaitu, sumber daya, kelembagaan dan komunikasi.

Sumber daya disimpulkan kurang, sumber daya manusia pada Pamsimas Kecamatan Tembalang masih kekurangan baik segi kuantitas dan kualitasnya. Sedangkan sumber daya anggaran sangat terbatas mengingat anggaran yang diberikan dari Kota Semarang juga sangat kecil. Faktor kelembagaan juga belum baik, dikarenakan banyaknya pihak yang terkait dengan Pamsimas. Lembaga tersebut belum berfungsi sepenuhnya seperti yang telah ditetapkan. Diantara ketiga faktor, hanya faktor komunikasi yang sudah diterapkan dengan cukup baik.

### **Saran**

1. Meningkatkan kinerja program Pamsimas Tembalang dapat dilakukan dengan meningkatkan kriteria yang kurang pada pelaksanaan:
  - Upaya untuk mengatasi kurangnya kecukupan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk menguasai buku pedoman dan buku petunjuk teknis, agar sistem administrasi, pembukuan, keuangan dan pelaporan sesuai dengan prosedur sehingga selalu memberikan data

akurat sebagai pertimbangan evaluasi selanjutnya.

- Usaha untuk meningkatkan tingkat pemerataan dapat dilakukan pada saat musyawarah penentuan prioritas pembangunan dilakukan oleh seluruh elemen pelaksana Pamsimas, hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya intervensi yang dapat menimbulkan konflik sosial. Pengawasan antar pelaksana Pamsimas juga sebaiknya dilakukan.
- Sebagai langkah mengatasi rendahnya responsivitas, BPSPAMS sebagai lembaga tingkat kelurahan ada baiknya membuat suatu posisi khusus pada organisasinya untuk ditugaskan melakukan pengecekan dan pemeliharaan sarana prasarana. Pihak konsultan juga harus cepat memberikan respon terhadap komplain yang didapat.
- Upaya untuk mengurai permasalahan ketepatan dilakukan dengan peninjauan kembali wilayah yang menjadi sasaran Pamsimas. Serta melakukan tertib administrasi supaya data sasaran warga kurang mampu diperbarui, hal tersebut dilakukan agar

pembangunan fasilitas selanjutnya tepat sasaran.

2. Meminimalisir kekurangan dari faktor keberhasilan program dapat dilakukan sebagai berikut:
  - Upaya meningkatkan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Pamsimas pada dasarnya bukan bantuan cuma-cuma dari pemerintah, melainkan masyarakat juga berperan dalam pelaksanaan Pamsimas. Ini ditujukan untuk mendorong jumlah relawan pelaksana Pamsimas di tingkat bawah.
  - Dalam rangka meningkatkan faktor kelembagaan, sebaiknya setiap lembaga yang terkait dengan Pamsimas membuat suatu forum tersendiri untuk koordinasi antar lembaga, agar tidak terjadi overlapping tugas atau ketidak harmonisan pada saat pelaksanaan. Jika perlu forum tersebut rutin dilakukan dalam periode tertentu sesuai kebutuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Islamy, M. Irfan. 1992. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Kencana, Inu. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta

Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

Suwitri, Sri. 2011. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Administrasi Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara

Tayibnapis, Farida Yusuf. 2008. Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian. Jakarta: Asdi Mahasatya

Toha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana

Wibawa, Samudra dan kawan kawan. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi. Malang: Bayumedia Publishing

Winarno. Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori & Proses. Jakarta: Buku Kita

Wirawan. 2011. Evaluasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada